

Katalog.9302023.9105

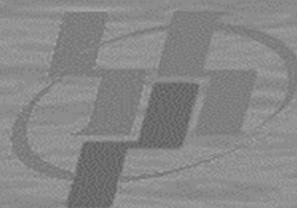
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN MANOKWARI  
MENURUT PENGELUARAN  
2015 - 2019**



*BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MANOKWARI*

Katalog.9302023.9105

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN MANOKWARI  
MENURUT PENGELUARAN  
2015 - 2019**



***BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MANOKWARI***

***PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MANOKWARI  
TAHUN 2015-2019***

ISSN : -  
Nomor Publikasi : 91050.2005  
Nomor katalog : 9302023.9105  
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm  
Jumlah Halaman : ix + 55 Halaman

**Naskah:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari

**Gambar Kover oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari

**Ilustrasi Gambar:**

Pulau Lemon Manokwari edited by Canva

**Diterbitkan oleh:**

© BPS Kabupaten Manokwari

**Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya*



## **BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MANOKWARI**

---

### **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019. Publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan para konsumen data sekaligus sebagai media informasi kuantitatif tentang perkembangan ekonomi dari sisi penggunaan atau konsumsi masyarakat, pemerintah, lembaga non profit, termasuk penggunaan untuk keperluan investasi yang ada di Manokwari.

Secara lebih terperinci, publikasi ini memuat informasi tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi penggunaan beserta analisisnya baik secara time series (dari waktu ke waktu) maupun analisis rasio lainnya.

Kepada semua pihak telah memberikan bantuan dan dukungan dalam upaya penyusunan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan.

Manokwari, Mei 2020

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MANOKWARI**



MUSTAMIR,SE

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB .....	4
<b>Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	10
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	15
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) .....	18
2.5 Perubahan Inventori .....	22
2.6 Ekspor Impor .....	25
<b>Bab III Tinjauan Perekonomian Manokwari Berdasarkan PDRB Pengeluaran Manokwari Tahun 2015-2019 .....</b>	<b>27</b>
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran.....	28
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	36
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	37
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	38
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	39
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa .....	40
<b>Bab IV Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019 .....</b>	<b>42</b>
4.1 PDRB (Nominal) .....	43

4.2	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB.....	44
4.3	Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	44
4.4	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) .....	45
<b>Bab V Penutup.....</b>		<b>47</b>
<b>Lampiran.....</b>		<b>49</b>

<https://manokwarikab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 29
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019 ..... 31
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 32
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 32
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 34
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 34
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 35
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 36
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 37
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 38
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 39
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 40
Tabel 14	Perkembangan Ekspor dan Impor Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019..... 41

Tabel 15	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019.....	43
Tabel 16	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB Tahun 2015-2019.....	44
Tabel 17	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019.....	45
Tabel 28	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019.....	46

<https://manokwarikab.bps.go.id>

# DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	
PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah).....	29
Grafik 2	
Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah) .....	30

<https://manokwarikab.bps.go.id>

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Juta Rp) ..... 50
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran. Kabupaten Manokwari (Juta Rp) ..... 51
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Persen) ..... 52
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Persen) ..... 53
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari..... 54
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Persen)..... 55

# PENDAHULUAN

A hopeless person sees difficulties in every chance, but a hopeful person sees chances in every difficulty

- Ali bin Abi Thalib -

## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak memperlakukan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA),

perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### **Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?**

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

---

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
  - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
- Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

#### Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

#### Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

II

RUSSIA

3.056 deaths  
Hubei China

827 deaths  
Italy

199 deaths

# METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

48 deaths  
France France

31 deaths  
Washington

22 deaths  
Henan China

16 deaths  
Japan

13 deaths  
Heilongjiang

Forgiveness is the best victory

- Ali bin Abi Thalib -

## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

### I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

### II. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### III. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereleengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);  
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

#### IV. Penghitungan PKRT Tahunan

##### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendefelasikan (*deflated*) PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu  $\times (30/7) \times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan  $\times 12 \times$  jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu; Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP,
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

## 2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

### I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### II. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung Papuab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan

berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### III. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### IV. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

#### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

#### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT,  $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

$j$  : jenis pengeluaran LNPRT,  $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflasikan (*deflate*) PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

### I. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

## II. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

## III. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
- d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

#### IV. Penghitungan PDRB Tahunan

##### 1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

##### 2. Metode Penghitungan

###### a. PK-P adh Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P kabupaten atas dasar harga Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten tersebut ditambah pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

###### b. PK-P Provinsi atas dasar harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### II. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### III. Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

#### IV. Penghitungan PMTB Tahunan

##### 1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor dua digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

##### 2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

## Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

## Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "*ekstrapolasi*" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

*Pertama*, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-deflate PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI

### I. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

### II. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

### III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### IV. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

#### 1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

## 2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;

- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan adjustment dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

## 2.6 EKSPOR IMPOR

### I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### II. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### III. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- Ekspor/import barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut.
- Ekspor/import jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- Net Ekspor antar daerah
  - Ekspor antar daerah

- Impor antar daerah

#### IV. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

##### 1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

##### 2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/ dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (undocumented transnsati) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

TINJAUAN  
PEREKONOMIAN  
MANOKWARI  
BERDASARKAN PDRB  
PENGELUARAN  
MANOKWARI  
TAHUN 2015-2019

Blessed is he whose own faults keep him  
from seeing the faults of others

- Ali bin Abi Thalib -

### 3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2010, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Dalam penilaiannya, PDRB suatu daerah dihitung dengan dua pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Adapun PDRB ADHB Kabupaten Manokwari pada periode 2015 hingga 2019 tersaji pada tabel 1.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.971,94	3.197,89	3.705,15	4.091,54	4.501,21
2. Konsumsi LNPRT	145,59	158,73	181,91	200,08	230,90
3. Konsumsi Pemerintah	2.174,69	2.395,85	2.670,91	2.764,83	3.095,73
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.080,69	3.428,61	4.051,12	4.272,40	4.265,56
5. Perubahan Inventori	-168,24	36,77	43,24	60,35	59,21
6. Net Ekspor	-1.888,74	-2.255,20	- 2.271,65	- 2.171,58	- 2.074,28
<b>P D R B</b>	<b>6.962,65</b>	<b>7.618,98</b>	<b>8.380,67</b>	<b>9.217,63</b>	<b>10.078,33</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada periode tahun 2015 - 2019 PDRB Kabupaten Manokwari atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Dalam periode 5 tahun terakhir, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Manokwari tercatat meningkat sebesar 3.115,68 miliar Rupiah.

Di sisi lain, PDRB pengeluaran Kabupaten Manokwari juga dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau

konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Manokwari pada periode 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019**

*(Miliar Rp)*

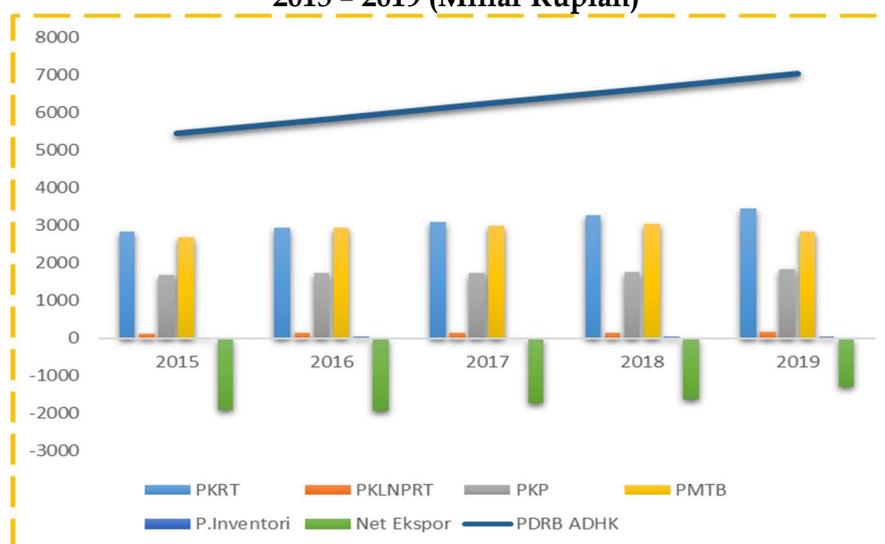
Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.683,47	2.827,47	3.093,95	3.267,03	3.442,91
2. Konsumsi LNPRT	123,44	129,02	140,34	151,90	171,50
3. Konsumsi Pemerintah	1.632,75	1.692,43	1.733,42	1.749,66	1.830,30
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.495,71	2.684,94	2.984,11	3.053,70	2.846,87
5. Perubahan Inventori	-155,96	27,17	28,63	36,52	40,62
6. Net Ekspor	-1.703,37	-1.911,41	- 1.724,08	- 1.626,74	- 1.293,83
<b>P D R B</b>	<b>5.449,62</b>	<b>5.844,72</b>	<b>6.256,36</b>	<b>6.632,07</b>	<b>7.038,37</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

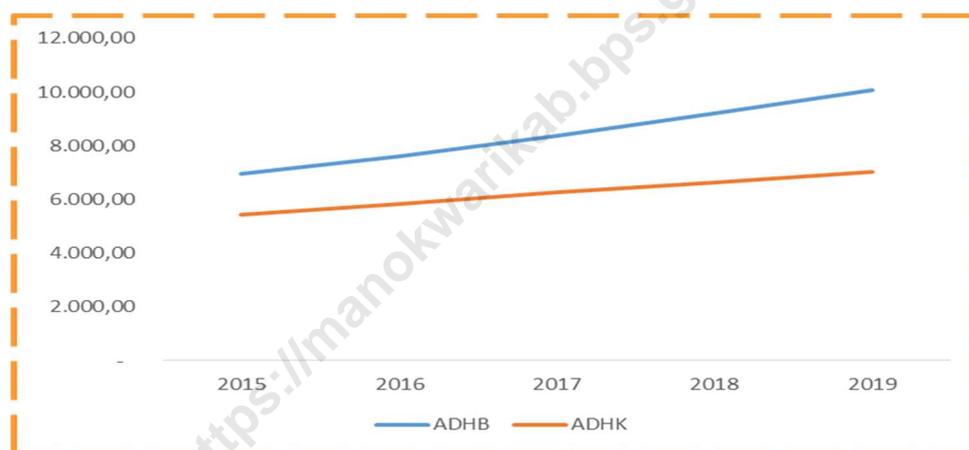
Pada tabel 2, senada dengan PDRB atas dasar harga berlakunya, PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Manokwari juga cenderung meningkat dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Manokwari tercatat sebesar 5.449,62 miliar Rupiah. PDRB yang tercipta kian meningkat di setiap tahunnya hingga mencapai 7.038,37 miliar Rupiah pada tahun 2019. Pertambahan nilai ini dapat diartikan bahwa terjadinya peningkatan perekonomian secara riil di Kabupaten Manokwari, yang dilihat dari sisi meningkatnya volume permintaan atau konsumsi akhir.

**Grafik 1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari 2015 - 2019 (Miliar Rupiah)**



Pergerakan PDRB atas dasar harga berlaku beserta seluruh komponen penyusunnya disajikan pada Grafik 1. Pada grafik tersebut terlihat perkembangan masing-masing komponen penyusunan PDRB selama 5 tahun terakhir. Secara umum, selama 5 tahun terakhir PDRB Kabupaten Manokwari didominasi oleh 2 komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan yang tertinggi diantara komponen lain. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Manokwari cukup dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Meskipun demikian, perekonomian masih dapat diimbangi oleh besar nilai komponen lainnya.

**Grafik 2. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)**



Grafik 2 menyandingkan PDRB atas dasar harga berlaku serta PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Manokwari sepanjang 2015 hingga 2019. Dari ilustrasi tersebut nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), Net Ekspor (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	45,93	45,61	44,21	44,39	44,66
2. Konsumsi LNPR	2,28	2,20	2,17	2,17	2,29
3. Konsumsi Pemerintah	34,41	34,24	31,87	30,00	30,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	49,24	50,76	48,34	46,35	42,32
5. Perubahan Inventori	0,53	0,62	0,52	0,65	0,59
6. Net Ekspor	-32,39	-33,43	-27,11	-23,56	-20,58
<b>P D R B</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Tabel 3 menyajikan distribusi atau peranan masing-masing komponen penyusun PDRB ADHB menurut pengeluaran. Dari tabel tersebut, Net Ekspor yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa barang yang diimpor masuk ke Kabupaten Manokwari lebih besar daripada barang yang berhasil diekspor keluar Kabupaten Manokwari. Hal tersebut terjadi ditengarai karena banyaknya komoditas barang konsumsi yang didatangkan dari hasil produksi di luar Kabupaten Manokwari. Perkembangan net ekspor sendiri berangsur membaik pada tahun 2017-2019. Meskipun tergolong masih sangat besar nilai negatifnya.

Komponen yang memiliki distribusi terbesar, dua diantaranya adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Sepanjang 5 tahun terakhir, distribusi kedua komponen tersebut berkisar 40-50 persen. Bila ditilik satu per satu, Konsumsi Rumah Tangga mengalami penurunan selama tahun 2015 hingga 2017. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada 2019. Sementara distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto sempat menyentuh angka 50 persen pada 2016. Namun terus mengalami penurunan hingga menembus angka 42,32 persen tahun 2019.

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari, 2015 - 2019**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,37	3,98	5,24	5,59	5,38
2. Konsumsi LNPRT	4,52	3,00	5,61	8,23	12,90
3. Konsumsi Pemerintah	3,66	1,95	0,46	0,94	4,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,58	9,62	1,39	2,33	- 6,77
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
<b>P D R B</b>	<b>7,36</b>	<b>7,25</b>	<b>7,04</b>	<b>6,01</b>	<b>6,13</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Tabel 4 merangkum laju pertumbuhan PDRB adhk konstan 2010 Kabupaten Manokwari beserta komponen yang menyusunnya sepanjang periode 2015 hingga 2019. Laju pertumbuhan menunjukkan kinerja perekonomian suatu daerah. Nilai laju pertumbuhan yang positif mengindikasikan adanya peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah pada periode / tahun berjalan dibandingkan kinerjanya pada periode/ tahun sebelumnya.

Secara umum, sepanjang periode 2015 hingga 2019 kinerja perekonomian Kabupaten Manokwari selalu bernilai positif. Namun diindikasikan mengalami perlambatan selama empat tahun kebelakang. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015, sebesar 7,36 persen. Laju pertumbuhan kemudian bergerak melambat menjadi 6,01 persen di tahun 2018. Namun akhirnya Tahun 2019 mampu berada di nilai 6,13 persen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Manokwari 2015 - 2019**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	113,10	118,21	119,75	125,24	130,74
2. Konsumsi LNPRT	123,03	126,36	129,62	131,72	134,64
3. Konsumsi Pemerintah	141,56	151,19	154,08	158,02	169,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	127,70	131,39	135,76	139,91	149,83
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
<b>P D R B</b>	<b>127,76</b>	<b>130,36</b>	<b>133,95</b>	<b>138,99</b>	<b>143,19</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Indeks implisit Kabupaten Manokwari sepanjang 5 tahun terakhir tersaji pada Tabel 5. Indeks implisit merupakan salah satu indikator turunan dari PDRB yang menggambarkan perkembangan harga tahun berjalan dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Secara umum indeks implisit memiliki kecenderungan untuk meningkat di setiap tahun. Nilai indeks implisit pada tahun 2019 mencapai 143,19 dan merupakan nilai indeks implisit tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa pada tahun 2019, perkembangan harga terhadap tahun dasar meningkat paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### **3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA**

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar kedua atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Manokwari, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Manokwari maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2015 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 hingga 2019 memiliki kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2015, Konsumsi Rumah Tangga memiliki distribusi sebesar 45,93 persen. Nilai menurun dan meningkat hingga mencapai 44,66 persen pada tahun 2019.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari Tahun 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.197,89	3.475,13	3.705,15	4.091,54	4.501,21
b. ADHK 2010/2010 (Miliar Rp)	2.827,47	2.939,90	3.093,95	3.267,03	3.442,91
Proporsi terhadap PDRB ( % ADHB)	45,93	45,61	44,21	44,39	44,66
Rata-rata konsumsi perKapita (Ribuan Rp)					
a. ADHB	19.951,30	21.114,39	21.923,95	23.650,53	25.430,56
b. ADHK 2010	17.640,24	17.862,40	18.307,38	18.884,59	19.451,47
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,37	3,98	5,24	5,59	5,38
b. Perkapita	2,72	1,26	2,75	3,15	3,00
Jumlah penduduk (000 orang)	160	165	169	173	177

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Perkembangan konsumsi rumah tangga sepanjang periode 2015 hingga 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang selalu bernilai positif. Pada tahun 2015 - 2016, laju pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mengalami perlambatan sebesar 1,39 poin yang diartikan bahwa terjadi penurunan kinerja Konsumsi Rumah Tangga. Kemudian laju pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga mengalami fluktuasi hingga akhirnya berubah sebesar 0,14 poin pada tahun 2019 dibanding 2017.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari. Tahun 2015 – 2019<sup>5</sup>**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	51,55	52,94	51,53	50,65	51,51
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,88	1,85	1,89	1,88	1,99
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,61	12,07	12,18	12,16	12,50
d. Kesehatan & Pendidikan	5,18	5,06	5,15	4,97	4,65
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	17,59	17,27	18,24	19,46	19,60
f. Hotel & Restoran	4,75	4,60	4,74	4,76	4,54
g. Lainnya	6,44	6,21	6,26	6,11	5,21
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

<sup>5</sup> Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB )

Tabel 7 menunjukkan distribusi Kelompok Konsumsi pada komponen Konsumsi Rumah Tangga sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan kebutuhan rumah tangga akan konsumsi makanan, minuman, dan rokok masih lebih besar dibandingkan konsumsi non makanan lainnya. Hal ini ditunjukkan dari proporsi untuk Kelompok Konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok selalu lebih dari separuh Konsumsi Rumah Tangga yang ada. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan sebenarnya cukup penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya. Pola konsumsi masyarakat yang masih fokus pada pemenuhan kebutuhan makanan berarti menunjukkan tatanan ekonomi sosial masyarakat yang belum menyentuh level kesejahteraan secara optimal.

**Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari, Tahun 2015 – 2019**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,01	4,39	3,85	4,47	5,77
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,49	5,51	6,12	9,62	9,54
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,05	1,04	5,55	8,39	7,43
d. Kesehatan & Pendidikan	5,81	4,54	5,74	3,64	- 0,34
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,93	4,59	8,56	8,73	9,40
f. Hotel & Restoran	2,22	2,10	6,82	4,63	2,93
g. Lainnya	5,50	4,67	5,50	2,52	- 7,21
<b>Total Konsumsi</b>	<b>5,37</b>	<b>3,98</b>	<b>3,85</b>	<b>4,47</b>	<b>5,77</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Selain distribusinya, kelompok konsumsi juga dianalisis dari sisi pertumbuhan riilnya. Pada tabel 8, terlihat laju pertumbuhan riil dari Konsumsi Rumah Tangga serta Kelompok Konsumsi penyusunnya. Pada tahun 2019, pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga tercatat mencapai 5,77 persen dan menjadi pertumbuhan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut disokong oleh pertumbuhan seluruh Kelompok Konsumsi yang berkisar di atas 5 persen pada tahun 2019 kecuali kesehatan & pendidikan, hotel & restoran dan lainnya.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Manokwari, Tahun 2015 – 2019<sup>6</sup>**

<i>(Persen)</i>					
<b>Kelompok Konsumsi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,37	6,90	-0,07	3,90	5,77
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,71	1,53	2,29	0,22	6,53
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,86	2,95	1,98	1,71	5,21
d. Kesehatan & Pendidikan	4,46	1,38	2,73	2,73	3,30
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,71	2,03	3,72	8,34	1,27
f. Hotel & Restoran	2,14	3,22	2,80	6,03	1,94
g. Lainnya	1,22	0,09	1,98	5,17	1,01
<b>Total Konsumsi</b>	<b>2,12</b>	<b>4,51</b>	<b>1,31</b>	<b>4,58</b>	<b>4,39</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9 menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi sepanjang tahun 2015-2019. Pada tahun 2017, Kelompok Konsumsi Makanan, Minuman, dan Rokok mengalami kontraksi sebesar 0,07 persen. Namun kontraksi yang terjadi pada kelompok konsumsi tersebut tidak membawa pengaruh kepada laju pertumbuhan implisit Konsumsi Rumah Tangga secara umum.

### **3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT**

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut. dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor (dibawah 3 persen).

Selama periode 2015-2019, nilai konsumsi LNPRT baik adh Berlaku maupun adh Konstan selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian pula proporsi terhadap PDRB yang selalu meningkat. Meskipun demikian, nilainya yang sangat kecil menyebabkan proporsi konsumsi

<sup>6</sup> Tingkat perubahan harga produk konsumsi

LNPRT terhadap PDRB tidak pernah lebih dari tiga persen. Pada tahun 2019 Konsumsi LNPRT mencatatkan penambahan laju pertumbuhan sebesar 12,90 persen dikarenakan Manokwari yang merupakan ibukota Papua Barat menjadi titik sentral berjalannya proses bisnis pemilu presiden dan wakil rakyat.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Manokwari, 2015-2019**

Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT ( <i>Milyar Rp</i> )					
a. ADHB	158,73	167,92	181,91	200,08	230,90
b. ADHK 2010	129,02	132,89	140,34	151,90	171,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,28	2,20	2,17	2,17	2,29
Pertumbuhan Total Konsumsi LNPRT ( <i>Persen</i> )	4,52	3,00	5,61	8,23	12,90

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Manokwari serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 2.395,85miliar Rupiah. kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 3.095,73 miliar Rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010 yang juga mengalami peningkatan pada setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB kian mengalami penurunan *share* selama lima tahun terakhir dari sebesar 34,41 persen di tahun 2015 menjadi 30,72 persen di tahun 2019.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Manokwari, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)					
a. ADHB	2.395,85	2.608,84	2.670,91	2.764,83	3.095,73
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.692,43	1.725,52	1.733,42	1.749,66	1.830,30
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	34,41	34,24	31,87	30,00	30,72
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	14,95	15,85	15,82	15,98	17,46
b. ADHK 2010	10,56	10,48	10,27	10,11	10,32
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi Pemerintah	3,66	1,95	0,46	0,94	4,61
b. Perkapita	1,06	-0,71	-2,08	-1,49	2,06
Jumlah Penduduk (orang)	160.285	164.586	168.852	173.020	177.346

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dalam prakteknya pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 14,95 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

### **3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran. lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)<sup>7</sup>. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah). PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Pada tahun

<sup>7</sup> Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

2015, PMTB adh berlaku Kabupaten Manokwari tercatat sebesar 3.428,61 miliar Rupiah. Sementara bila dihitung mengabaikan pengaruh harga, PMTB adh konstan 2010 tercatat sebesar 2.684,94 miliar Rupiah.

Pertumbuhan PMTB cukup berfluktuasi sepanjang periode 5 tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,62 persen. Setelahnya, terjadi perlambatan laju pertumbuhan hingga mengalami kontraksi 6,77 persen tahun 2019.

Bila ditilik dari jenis PMTB, PMTB yang dominan ada di Kabupaten Manokwari merupakan PMTB Bangunan. Proporsi PMTB Bangunan terhadap keseluruhan PMTB di Kabupaten Manokwari selalu lebih dari 50 persen sepanjang tahun 2015 hingga 2019. Dari sisi laju pertumbuhan, PMTB Bangunan juga selalu mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi paling tidak selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Manokwari, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (Miliar Rp)					
a. ADHB	3.428,61	3.867,24	4.051,12	4.272,40	4.265,56
b. ADHK 2010	2.684,94	2.943,25	2.984,11	3.053,70	2.846,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	49,24	50,76	<b>48,34</b>	<b>46,35</b>	<b>42,32</b>
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Miliar Rp)	1.996,75	2.402,75	2.478,15	2.477,88	2.356,09
(Persen)	58,24	62,13	61,17	58,00	55,24
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.431,86	1.464,49	1.572,97	1.794,52	1.909,46
(Persen)	41,76	37,87	38,83	42,00	44,76
Total PMTB (Miliar Rp)	3.428,61	3.867,24	4.051,12	4.272,40	4.265,56
(Persen)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan Total PMTB (Persen)					
a. Bangunan	6,41	18,23	0,14	- 0,20	- 9,70
b. Non Bangunan	9,44	-3,61	3,74	6,93	- 1,80
Total PMTB	7,58	9,62	1,39	2,33	- 6,77

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi. konsumsi

ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki dua tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Manokwari, 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori ( <i>Miliar Rp</i> )					
a. ADHB	36,77	47,02	43,24	60,35	59,21
b. ADHK 2010	27,17	31,83	28,63	36,52	40,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,53	0,62	0,52	0,65	0,59

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci. perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

### 3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir. transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik. Tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri ataupun luar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa. Meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Net ekspor didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Pada penghitungan ekspor-impor tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor kabupaten menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*). Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Hasil net ekspor dapat memiliki dua angka. positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor lebih besar dari pada impor, demikian pula sebaliknya. Sama halnya dengan persentase pertumbuhannya. Jika pertumbuhan bernilai positif berarti nilai net ekspor (ekspor – impor) tahun tersebut lebih besar daripada net ekspor (ekspor – impor) tahun sebelumnya.

**Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Manokwari, Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor (Miliar Rp)					
a. ADHB	-2.255,20	-2.547,17	- 2.271,65	- 2.171,58	- 2.074,28
b. ADHK 2010	-1.911,41	-1.928,66	- 1.724,08	- 1.626,74	- 1.293,83
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-32,39	-33,43	-27,11	-23,56	-20,58

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

PERKEMBANGAN  
AGREGAT  
PDRB  
MENURUT PENGELUARAN  
KABUPATEN MANOKWARI  
TAHUN 2015-2019

Do not take someone's silence as his  
pride, perhaps he is busy fighting with  
his self

- Ali bin Abi Thalib -

## 4.1 PDRB (NOMINAL)

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas” karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga. dan tenaga kerja). Sebagai contoh untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Manokwari. Tahun 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB ( <i>Miliar Rp</i> )					
a. ADHB	6.962,65	7.618,98	8.380,67	9.217,63	10.078,33
b. ADHK 2010	5.449,62	5.844,72	6.256,36	6.632,07	7.038,37
PDRB Per Kapita Per Tahun ( <i>Ribu Rp</i> )					
a. ADHB	43.439,19	46.291,79	49.633,24	53.274,92	56.822,86
b. ADHK 2010	33.999,56	35.511,65	37.052,35	38.331,21	39.683,19
Pertumbuhan PDRB Perkapita Pertahun ( <i>Persen</i> )	4,67	4,45	4,34	3,45	3,52
Jumlah Penduduk ( <i>Orang</i> )	160.285	164.586	168.852	173.020	177.364
Pertumbuhan Penduduk ( <i>Persen</i> )	2,57	2,68	2,59	2,49	2,50

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Manokwari menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 15) seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Manokwari rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Bila dilihat laju pertumbuhannya, PDRB per kapita selalu mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun 2015 hingga 2019, walaupun ada pelambatan dari hingga 2019. Pertumbuhan per kapita pada periode 2015 hingga 2019 berada pada kisaran 3,45 hingga 4,67 persen.

## 4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik digunakan untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Perkembangan rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB berfluktuasi. Pada tahun 2015 hingga 2016 sempat menurun dari 0,93 menjadi 0,90. Kemudian dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 1,06. Artinya pada tahun 2019 produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga lebih besar dibandingkan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	3.197,89	3.475,13	3.705,15	4.091,54	4.501,21
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	3.428,61	3.867,24	4.051,12	4.272,40	4.265,56
<b>Perbandingan Konsumsi RT terhadap total PMTB</b>	<b>0,93</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,96</b>	<b>1,06</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

## 4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Adapun proporsi penggunaan untuk konsumsi akhir di Kabupaten Manokwari terhadap PDRB terangkum dalam Tabel 18 berikut.

**Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Manokwari, Tahun 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	3.197,89	3.475,13	3.705,15	4.091,54	4.501,21
b. LNPRT	158,73	167,92	181,91	200,08	230,90
c. Pemerintah	2.395,85	2.608,84	2.670,91	2.764,83	3.095,73
<b>Jumlah</b>	<b>5.752,47</b>	<b>6.251,89</b>	<b>6.557,96</b>	<b>7.056,46</b>	<b>7.827,84</b>
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	<b>6.962,65</b>	<b>7.618,98</b>	<b>8.380,67</b>	<b>9.217,63</b>	<b>10.078,33</b>
<b>Proporsi</b>	<b>0,83</b>	<b>0,82</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>	<b>0,78</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir selalu meningkat nilainya setiap tahun. Namun walaupun konsumsi akhir Manokwari cenderung meningkat namun proporsinya terhadap PDRB juga semakin mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB maupun eskpor) memiliki peranan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

#### 4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

**Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Manokwari.  
Tahun 2015 – 2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.449,62	5.844,72	6.256,36	6.632,07	7.038,37
Perubahan (Miliar Rp)	373,58	395,11	411,64	375,70	406,30
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.684,94	2.943,25	2.984,11	3.053,70	2.846,87
<b>ICOR</b>	<b>7,19</b>	<b>7,45</b>	<b>7,25</b>	<b>8,13</b>	<b>7,01</b>

\* Angka Sementara

\*\* Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2019. Besaran ICOR pada tahun 2015 adalah sebesar 7,19 kemudian meningkat menjadi 7,45 di tahun 2016. Tahun 2017 kembali ICOR menurun dan meningkat tajam menjadi 8,13 di Tahun 2018 sampai akhirnya kembali melambat menjadi 7,01 di Tahun 2019. Untuk kondisi 2019 dibandingkan 2018, penurunan ini mengindikasikan terjadi penambahan capital (modal) terhadap output yang lebih melambat dibanding tahun sebelumnya. Penambahan capital lebih lambat dibanding penambahan output untuk tahun 2019.

<https://manokwarikab.bps.go.id>

# PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 s.d 2019 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Manokwari pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk dan rumah tangga) sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2015-2019, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari yang disajikan ini memberikan gambaran PDRB Pengeluaran setelah Kabupaten Manokwari mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten (tahun 2012 hingga sekarang). Namun disisi lain, kondisi ini memberikan gambaran penting tentang perubahan struktur penggunaan barang dan jasa kabupaten Manokwari sebelum dan sesudah mengalami pemekaran wilayah.

<https://manokwarikab.bps.go.id>

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Juta Rp)**

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>3.197.894,61</b>	<b>3.475.133,43</b>	<b>3.705.146,77</b>	<b>4.091.540,88</b>	<b>4.501.208,68</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	1.648.619,85	1.839.642,92	1.909.214,47	2.072.448,61	2.318.593,60
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	60.165,54	64.456,47	69.968,79	76.867,37	89.697,43
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	403.194,13	419.391,65	451.447,04	497.699,70	562.568,76
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	165.802,96	175.726,74	190.895,48	203.255,05	209.241,98
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	562.497,22	600.297,70	675.950,19	796.228,53	882.165,62
1.f. Hotel dan Restoran	151.760,11	159.938,94	175.635,94	194.847,13	204.451,36
1.g. Lainnya	205.854,79	215.679,03	232.034,88	250.194,49	234.489,93
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>158.731,72</b>	<b>167.919,30</b>	<b>181.909,83</b>	<b>200.081,53</b>	<b>230.900,50</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>2.395.846,32</b>	<b>2.608.841,92</b>	<b>2.670.905,63</b>	<b>2.764.834,11</b>	<b>3.095.731,05</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>3.428.610,46</b>	<b>3.867.235,16</b>	<b>4.051.117,27</b>	<b>4.272.399,90</b>	<b>4.265.556,12</b>
4.a. Bangunan	1.996.752,82	2.402.748,91	2.478.145,73	2.477.882,41	2.356.094,62
4.b. Non-Bangunan	1.431.857,64	1.464.486,25	1.572.971,54	1.794.517,49	1.909.461,50
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>36.767,00</b>	<b>47.023,27</b>	<b>43.242,91</b>	<b>60.345,69</b>	<b>59.214,72</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-2.255.197,14</b>	<b>-2.547.174,93</b>	<b>- 2.271.651,22</b>	<b>- 2.171.575,92</b>	<b>- 2.074.281,07</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>6.962.653</b>	<b>7.618.978</b>	<b>8.380.671,20</b>	<b>9.217.626,19</b>	<b>10.078.329,99</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran. Kabupaten Manokwari (Juta Rp)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>2.827.465,29</b>	<b>2.939.900,17</b>	<b>3.093.947,44</b>	<b>3.267.033,89</b>	<b>3.442.910,01</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	1.493.847,62	1.559.412,59	1.619.486,27	1.691.918,88	1.789.526,27
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	54.867,87	57.893,20	61.436,44	67.345,06	73.770,94
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	327.078,68	330.480,30	348.818,32	378.082,14	406.189,19
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	145.381,38	151.987,37	160.716,00	166.570,32	165.999,34
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	478.733,47	500.726,49	543.606,45	591.059,33	646.628,68
1.f. Hotel dan Restoran	134.493,64	137.315,59	146.685,07	153.480,26	157.982,39
1.g. Lainnya	193.062,63	202.084,64	213.198,89	218.577,90	202.813,19
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>129.018,28</b>	<b>132.888,83</b>	<b>140.342,92</b>	<b>151.898,15</b>	<b>171.496,23</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>1.692.434,63</b>	<b>1.725.518,53</b>	<b>1.733.419,61</b>	<b>1.749.655,14</b>	<b>1.830.300,20</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>2.684.940,69</b>	<b>2.943.254,39</b>	<b>2.984.107,67</b>	<b>3.053.696,04</b>	<b>2.846.874,42</b>
4.a. Bangunan	1.626.503,19	1.923.031,71	1.925.774,58	1.922.010,59	1.735.607,07
4.b. Non-Bangunan	1.058.437,50	1.020.222,67	1.058.333,09	1.131.685,45	1.111.267,35
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>27.167,00</b>	<b>31.826,01</b>	<b>28.625,83</b>	<b>36.521,02</b>	<b>40.615,16</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-1.911.409,63</b>	<b>-1.928.664,43</b>	<b>- 1.724.080,51</b>	<b>- 1.626.737,61</b>	<b>- 1.293.826,70</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>5.449.616,26</b>	<b>5.844.723,50</b>	<b>6.256.362,96</b>	<b>6.632.066,62</b>	<b>7.038.369,32</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran Kabupaten Manokwari (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>45,93</b>	<b>45,61</b>	<b>44,21</b>	<b>44,39</b>	<b>44,66</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	23,68	24,15	22,78	22,48	23,01
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,86	0,85	0,83	0,83	0,89
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,79	5,50	5,39	5,40	5,58
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,38	2,31	2,28	2,21	2,08
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	8,08	7,88	8,07	8,64	8,75
1.f. Hotel dan Restoran	2,18	2,10	2,10	2,11	2,03
1.g. Lainnya	2,96	2,83	2,77	2,71	2,33
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>2,28</b>	<b>2,20</b>	<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>2,29</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>34,41</b>	<b>34,24</b>	<b>31,87</b>	<b>30,00</b>	<b>30,72</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>49,24</b>	<b>50,76</b>	<b>48,34</b>	<b>46,35</b>	<b>42,32</b>
4.a. Bangunan	28,68	31,54	29,57	26,88	23,38
4.b. Non-Bangunan	20,56	19,22	18,77	19,47	18,95
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>0,53</b>	<b>0,62</b>	<b>0,52</b>	<b>0,65</b>	<b>0,59</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-32,39</b>	<b>-33,43</b>	<b>-27,11</b>	<b>-23,56</b>	<b>-20,58</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran. Kabupaten Manokwari (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>5,37</b>	<b>3,98</b>	<b>5,24</b>	<b>5,59</b>	<b>5,38</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	5,01	4,39	3,85	4,47	5,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,49	5,51	6,12	9,62	9,54
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,05	1,04	5,55	8,39	7,43
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,81	4,54	5,74	3,64	- 0,34
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	7,93	4,59	8,56	8,73	9,40
1.f. Hotel dan Restoran	2,22	2,10	6,82	4,63	2,93
1.g. Lainnya	5,50	4,67	5,50	2,52	- 7,21
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPR</b>	<b>4,52</b>	<b>3,00</b>	<b>5,61</b>	<b>8,23</b>	<b>12,90</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>3,66</b>	<b>1,95</b>	<b>0,46</b>	<b>0,94</b>	<b>4,61</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>7,58</b>	<b>9,62</b>	<b>1,39</b>	<b>2,33</b>	<b>- 6,77</b>
4.a. Bangunan	6,41	18,23	0,14	- 0,20	- 9,70
4.b. Non-Bangunan	9,44	-3,61	3,74	6,93	- 1,80
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>7,36</b>	<b>7,25</b>	<b>7,04</b>	<b>6,01</b>	<b>6,13</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut  
Pengeluaran Kabupaten Manokwari**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>113,10</b>	<b>118,21</b>	<b>119,75</b>	<b>125,24</b>	<b>130,74</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	110,36	117,97	117,89	122,49	129,56
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	109,66	111,34	113,89	114,14	121,59
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	123,27	126,90	129,42	131,64	138,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	114,05	115,62	118,78	122,02	126,05
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	117,50	119,89	124,35	134,71	136,43
1.f. Hotel dan Restoran	112,84	116,48	119,74	126,95	129,41
1.g. Lainnya	106,63	106,73	108,83	114,46	115,62
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPR</b>	<b>123,03</b>	<b>126,36</b>	<b>129,62</b>	<b>131,72</b>	<b>134,64</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>141,56</b>	<b>151,19</b>	<b>154,08</b>	<b>158,02</b>	<b>169,14</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>127,70</b>	<b>131,39</b>	<b>135,76</b>	<b>139,91</b>	<b>149,83</b>
4.a. Bangunan	122,76	124,95	128,68	128,92	135,75
4.b. Non-Bangunan	135,28	143,55	148,63	158,57	171,83
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>127,76</b>	<b>130,36</b>	<b>133,95</b>	<b>138,99</b>	<b>143,19</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto  
(2010=100) Menurut Pengeluaran. Kabupaten Manokwari (Persen)**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018*</b>	<b>2019**</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)</b>	<b>2,12</b>	<b>4,51</b>	<b>1,31</b>	<b>4,58</b>	<b>4,39</b>
1.a. Makanan. Minuman. dan Rokok	1,37	6,90	-0,07	3,90	5,77
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,71	1,53	2,29	0,22	6,53
1.c. Perumahan. Perkakas. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,86	2,95	1,98	1,71	5,21
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,46	1,38	2,73	2,73	3,30
1.e. Transportasi. Komunikasi. Rekreasi. dan Budaya	2,71	2,03	3,72	8,34	1,27
1.f. Hotel dan Restoran	2,14	3,22	2,80	6,03	1,94
1.g. Lainnya	1,22	0,09	1,98	5,17	1,01
<b>2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT</b>	<b>4,31</b>	<b>2,71</b>	<b>2,58</b>	<b>1,62</b>	<b>2,22</b>
<b>3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah</b>	<b>6,28</b>	<b>6,80</b>	<b>1,91</b>	<b>2,56</b>	<b>7,03</b>
<b>4. Pembentukan Modal Tetap Bruto</b>	<b>3,45</b>	<b>2,89</b>	<b>3,32</b>	<b>3,06</b>	<b>7,09</b>
4.a. Bangunan	0,18	1,78	2,99	0,19	5,30
4.b. Non-Bangunan	8,36	6,11	3,54	6,69	8,36
<b>5. Perubahan Inventori</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Net Ekspor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto (1 s.d 6)</b>	<b>2,68</b>	<b>2,03</b>	<b>2,76</b>	<b>3,76</b>	<b>3,03</b>

\*Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://manokwarikab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MANOKWARI**

Jl. Percetakan Negara, Manokwari - Papua Barat, 98312  
Telp. (0986) 214960

Homepage : <http://manokwarikab.bps.go.id>

Email : [bps9105@bps.go.id](mailto:bps9105@bps.go.id)